

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: pengertian umum dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Pengertian secara umum koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan para anggotanya. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Hendrojogi (2007;21).”

Dengan penjelasan bahwa anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, maka koperasi dapat diartikan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Koperasi diatur dalam UU No.12 tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menjelaskan tentang definisi koperasi. Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 berbunyi:

“Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.”

Selain definisi koperasi menurut Hendrojogi (2007;22) mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”

Dari beberapa pengertian koperasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di Indonesia mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anggota pada umumnya dan masyarakat pada khususnya yang mengandung unsur demokrasi, sosial dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Karena itu, berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti disajikan sebagai berikut:

- a. Koperasi memiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. (Rudianto,2010;4).”

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU No.25/1992 itu, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut:

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
- b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, mudah dipahami bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian.

2.1.2 Landasan, Fungsi dan Peran Koperasi

Landasan koperasi terbagi atas landasan ideal koperasi adalah Pancasila yaitu sila kelima. Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. Sedangkan landasan mental dari koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Fungsi dan peran koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 adalah:

- a. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan dasarnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. *Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi.* Karena itu, secara lebih terinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. *Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka*

Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

b. *Pengelolaan dilakukan secara demokratis.*

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

- c. *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.*

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut juga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

- d. *Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.*

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

- e. *Kemandirin.*

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut Rudianto (2010;5) koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang

secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Hal ini berarti keikutsertaan anggota koperasi terbatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.1.5 Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi menurut Rudianto (2010;8) terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

a. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran para anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan

pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan menjadi modal koperasi karena bersifat tidak permanen, di mana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

1. *Simpanan Pokok* adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
 2. *Simpanan Wajib* adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan pokok ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. **Simpanan sukarela** adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.
- b. Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

- c. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
- d. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.
- e. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima oleh koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

2.1.6 Perangkat Organisasi Koperasi

Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia, *planning* dalam manajemen adalah ciptaan manusia *organizing* selain mengatur unsur manusia, *actuating* adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedangkan *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen selalu dapat meningkatkan hasil kinerjanya (Ninik Widiyanti;2007). Dari fakta di atas dapatlah dibenarkan pendapat yang menyatakan bahwa sukses tidaknya sesuatu kegiatan koperasi tergantung kepada orang-orang yang menjadi anggotanya. Betapapun sempurna rencana-rencana, organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila orang-orang tidak mau melakukan pekerjaan yang diwajibkan atau bila mereka tidak

menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka seseorang manajer tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat dicapai.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi juga harus memiliki seperangkat organisasi yang benar-benar terbentuk dan terorganisir. Adapun perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan tertinggi suatu rapat anggota tetap ada batasnya yaitu prinsip koperasi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pentingnya rapat-rapat di dalam suatu koperasi, dapat dilihat pada formulir akta pendirian Koperasi pasal 27 ayat (5), yang menyatakan bahwa tempat dan tanggal serta acara rapat harus diberitahukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rapat diadakan. Yang bertanggung jawab menyelenggarakan rapat anggota adalah Pengurus Koperasi. Rapat Anggota pada umumnya diadakan sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan, disingkat RAT di mana pengurus memberi pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang lampau. Ada juga yang mengadakan dua kali rapat anggota dalam satu tahun yaitu satu kali untuk menyusun Anggaran Biaya dan Pendapatan (rencana usaha) untuk tahun yang akan datang dan kedua kali rapat anggota tahunan untuk membicarakan kebijaksanaan Pengurus selama tahun yang lampau. Yang pertama diadakan menjelang akhir tahun buku

(September-Desember), sedang yang kedua diadakan beberapa bulan sesudah akhir tahun buku.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi membicarakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian kebijaksanaan Pengurus dalam memimpin Koperasi selama tahun buku yang lampau.
2. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi.
3. Penilaian laporan Badan Pemeriksa.
4. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha koperasi
5. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya.
6. Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa (jika masing-masing sudah berakhir masa jabatannya).
7. Masalah-masalah yang timbul dalam rapat.

b. Pengurus

Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Umumnya orang yang dipilih sebagai Pengurus haruslah seorang yang jujur dan memiliki keterampilan kerja.

Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban pengurus adalah:

1. Menentukan pelaksanaan atau jalannya koperasi.

2. Harusnya selalu mengadakan hubungan dengan atau menjadi penghubung antara koperasi dengan para anggotanya.
3. Memberi penerangan kepada anggota agar mereka kepada koperasinya dapat dipelihara dengan baik. Disamping itu harus selalu berusaha menjaga keutuhan jiwa koperasi mereka.
4. Mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Pengurus bertanggung jawab atas segala utang-piutang koperasi atau yang dibeli dengan kredit.
6. Pengurus mengawasi gerak dan jalannya Koperasi, agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap koperasi dan agar koperasi tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Pengurus harus secara teratur mengawasi pembelanjaan koperasi agar kedudukan koperasi dalam hal pembelanjaan makin stabil.
8. Pengurus harus juga memberikan garis kebijaksanaan dalam soal investasi modal dan menentukan cara-cara kontinuitas keberhasilan koperasi dapat terjamin.

Disamping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, pengurus mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memanggil rapat biasa maupun rapat khusus diperintahkan oleh Rapat Anggota maupun tidak.
2. Mengangkat atau memecat manajer.

3. Di dalam Koperasi Primer seorang anggota Pengurus hanya mempunyai hak satu suara. Akan tetapi pada Koperasi Sekunder hak suaranya dapat lebih dari satu.

c. Pengawas

Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang mungkin adalah lebih bijaksana daripada memberikan hukuman dan peringatan. Jadi tugas pengawas (Pasal 39 UU No. 25/1992), ayat (1):

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Juga pengawal mempunyai wewenang, ayat (2): a) meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan b) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

d. Manajer

Manajer adalah pimpinan dari seluruh karyawan yang dimiliki oleh koperasi yang disertai tugas dan bertanggungjawab kepada pengurus. Kedudukan manajer hanyalah sebagai pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan oleh RAT sehingga ia bertanggungjawab kepada pengurus.

2.2 Koperasi Menurut Pandangan Islam

Menurut Hendi Suhendi (2009;291) yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Dalam pandangan islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Menurut Sayyid Sabiq (2009). *syirkah* ada empat macam yaitu:

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing.

b. *Syirkah Muwafadhah*

Syirkah Muwafadhah merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
2. Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
3. Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyarikat dengan non muslim.
4. Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirkah (kerjasama).

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka.

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.

Dikaji dari definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata atau sesuai dengan besarnya modal yang ditanam. persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara', karena dengan persekutuan berarti ada kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, di dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَعَنُوا يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ بَخِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ كَانُوا مُتْرَكِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْوَالِهِمْ خَالِفُوا الظَّالِمِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْوَالِهِمْ خَالِفُوا الظَّالِمِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْوَالِهِمْ خَالِفُوا الظَّالِمِينَ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bertolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong (ta'awun) dalam kebaikan dan dalam taqwa dianjurkan oleh Allah, maka koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

Di dalam Kitabullah, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْوَالِهِمْ خَالِفُوا الظَّالِمِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْوَالِهِمْ خَالِفُوا الظَّالِمِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْوَالِهِمْ خَالِفُوا الظَّالِمِينَ



“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka itu.” (Q.Surah Shad: 24)

2.3 Tinjauan Tentang Akuntansi dan Laporan Keuangan.

2.3.1 Pengertian Akuntansi

Makmum H. Lili M. Sadeli (2010;2) , akuntansi merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apa pun bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. *Pertama*, akuntansi adalah ilmu pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. *Kedua*, auditing ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah akuntansi lebih luas meliputi baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktek, maupun pemeriksaan dan penilaian. Sementara itu.

Definisi akuntansi secara luas adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para pemakai tersebut. Termasuk dalam definisi ini adalah keharusan bagi akuntansi untuk mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya.

2.3.2 Pengertian, Tujuan dan Keterbatasan Laporan Keuangan.

Menurut Sudarsono dan Edilius (2010) aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kehidupan koperasi. Adapun tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi adalah:

- a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
- b. Menilai prestasi pengurus
- c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggota
- d. Menilai kondisi keuangan koperasi
- e. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan koperasi.

Menurut Sofyan (2004;105) mengatakan laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Budi Rahardjo (2007;53) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (Bank atau Lembaga Keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Pengertian laporan keuangan untuk badan usaha koperasi menurut Raharda Manurung (2006) adalah:

“Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan

secara keseluruhan (*Corporate*) sebagai pertanggungjawaban pengurus atau pengelola keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota.”

Pada badan usaha koperasi, pengurus bertugas mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP (2009) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan kepentingan ekonomi apa yang dapat mereka buat, misalnya kepentingan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau kepentingan untuk mengganti manajemen.

Agar mencapai tujuannya, laporan keuangan harus disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi dasar yang paling pokok adalah menggunakan “Dasar Akrua” dan “Kelangsungan Usaha”. Dengan dasar akrua ini pengaruh transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrua memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas pada masa depan. Oleh karena itu,

laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang berguna bagi pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun dengan dasar asumsi kelangsungan perusahaan dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud dan berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

Selain menggunakan asumsi-asumsi dasar diatas, menurut SAK ETAP laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Dapat Dipahami

Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai.

b. Relevan

Informasi yang disajikan harus dapat dipakai oleh pihak-pihak yang memerlukan untuk pengambilan keputusan

c. Materialitas

Informasi dipandang meterial apabila kelalaian atau kesalahan yang dicantumkan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung kepada besarnya kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dan kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*mistatement*).

d. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan, material yang dapat diandalkan pemakainya sebagai pemakai yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk badan hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, pengguna pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi.

g. Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dan memuat penjelasan yang cukup informatif sehingga tidak menyesatkan.

h. Dapat Dibandingkan

Pemakaian harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau trend posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan, maka perusahaan harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten.

Sri Mulyani Erlina (2007) mengemukakan bahwa laporan keuangan secara teoritis mempunyai banyak keterbatasan antara lain:

1. Fleksibilitas penerapan metode-metode akuntansi. Prinsip akuntansi yang fleksibel memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda dan memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menentukan metode-metode akuntansi yang akan dipilih.
 2. Banyak pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang dibuat berdasarkan kebijakan. Penentuan “waktu” untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kebijakan dapat digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi besarnya laba yaitu dengan mempercepat pengeluaran-pengeluaran tersebut atau menggesernya pada periode-periode berikutnya.
 3. Laporan keuangan yang berisi data masa lalu memiliki keterbatasan informasi mengenai likuidasi perusahaan yang akan datang.
- i. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

2.3.3 Pelaporan Keuangan Koperasi Menurut SAK ETAP 2009 (Revisi 2007)

Menurut IAI dalam SAK ETAP merupakan revisi dari PSAK No. 27 tahun 2007 merupakan standar akuntansi yang khusus mengatur mengenai akuntansi untuk badan usaha koperasi. Pernyataan ini mengatur akuntansi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggotanya yaitu meliputi transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, serta transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, sedangkan transaksi dari hubungan koperasi dengan non anggotanya diperlakukan sama dengan transaksi pada badan usaha lainnya.

Hal-hal yang diatur dalam SAK ETAP ini antara lain mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban serta mengenai laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi terdiri atas:

a. Neraca

1. Aktiva

Aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan koperasi. Aktiva terdiri dari:

1.1 Aktiva Lancar

Aktiva yang tingkat perputarannya satu tahun. Termasuk pinjaman, persediaan barang, pembayaran dimuka, dan aktiva lainnya yang dapat diputarkan paling lama dalam satu tahun.

1.2 Penyertaan

Penanaman pada badan usaha lain, baik pada badan usaha koperasi lain atau badan usaha swasta maupun badan usaha milik Negara, serta badan usaha yang dilakukan oleh anggota. Pernyataan dan penanaman ini sifatnya jangka panjang. Termasuk dalam kategori penyertaan atau penanaman ini antara lain adalah simpanan pada koperasi sekunder, khususnya hanya simpanan pokok dan simpanan wajib, penanaman saham pada perusahaan swasta, penanaman modal serta pada usaha anggota, pembelian aktiva tetap dengan tujuan untuk dijual kembali seperti tanah dan sebagainya.

1.3 Aktiva Tetap

Aktiva yang tahan lama yang dimiliki oleh koperasi untuk tujuan dioperasikan sendiri guna menghasilkan pendapatan. Termasuk dalam kategori aktiva tetap ini adalah tanah, bangunan, mesin, inventaris, kendaraan, dan sebagainya. Karena faktor ekonomis, kemajuan teknologi dan faktor fisik mengakibatkan kemampuan fisik dan ekonomis aktiva-aktiva tetap kecuali tanah akan menurun. Oleh karena itu, aktiva tetap harus disusutkan selama masa

manfaatnya dengan suatu metode penyusutan tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

1.4 Aktiva Lain-lain

Aktiva yang tidak dapat dimasukkan kedalam kelompok diatas, termasuk dalam kategori ini antara lain adalah aktiva tetap dalam proses pembangunan. Aktiva tetap yang tidak digunakan dan uang jaminan bank (Bank garansi untuk proyek jangka panjang).

2. kewajiban

Kewajiban atau hutang adalah klain pihak lain kepada koperasi yang harus dipenuhi atau dibayar dimasa datang sebagai perolehan barang (aktiva) atau jasa dimasa lalu. Kewajiban ini terdiri dari:

2.1 Kewajiban Jangka pendek

Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu yang paling lambat satu tahun mendatang atau kewajiban yang pelunasannya menggunakan sumber-sumber ekonomi jangka pendek (aktiva lancar) termasuk kategori ini antara lain adalah utang bank jangka pendek, utang simpanan sukarela anggota, utang beban, utang dana dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban yang pelunasannya harus dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun yang akan datang. Termasuk kedalam kewajiban jangka panjang adalah utang kredit investasi, kredit modal kerja, kredit pembelian saham perusahaan swasta dan badan usaha milik Negara dan untuk investasi lainnya.

2.3 Ekuitas

Dalam SAK ETAP paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas koperasi menurut Rudianto (2010:8) terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

1) Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran para anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan menjadi modal koperasi karena bersifat tidak permanen, di mana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- a) *Simpanan Pokok* adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- b) *Simpanan Wajib* adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan pokok ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan

rapat anggota. **Simpanan sukarela** adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2) Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

3) Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4) Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima oleh koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan keuangan yang melibatkan hasil usaha dari anggota dan laba atau rugi kotor dari non anggota. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban-beban perkoperasian dalam satu periode akuntansi. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha. Komponen perhitungan hasil usaha dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah tambahan nilai aktiva atau penurunan nilai kewajiban sebagai akibat dari kegiatan ekonomi koperasi. Kegiatan ekonomi koperasi adalah kegiatan yang menghasilkan (menjual) barang atau jasa, pertambahan aktiva atau penurunan uang akibat penambahan kekayaan sendiri (tambahan simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, modal penyerahan). Pendapatan dapat digolongkan kedalam:

a. Partisipasi Anggota

Partisipasi anggaran adalah Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama koperasi, yakni yang berasal dari hasil penjualan barang atau jasa kepada anggota.

1.2 Pendapatan dari Non Anggota

Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh non anggota.

1.3 Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah Pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan utama koperasi atau pendapatan yang timbul bukan dari kegiatan penjualan barang dan jasa. Pendapatan ini timbul karena sifat kegiatan usaha koperasi yang terkait dengan kegiatan lain yang tidak dapat dihindarkan.

1.4 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang diterima bukan berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi, tetapi pendapatan yang sifatnya intermiten, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

2. Beban-Beban

Beban adalah aktiva atau sumber daya ekonomi yang dikorbankan atau dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan dan untuk menjalankan usaha koperasi selama satu periode tertentu. Beban ini terdiri dari:

2.1 Beban Pokok

Merupakan harga pokok penjualan barang kepada anggota selama satu periode akuntansi. Dalam perhitungan hasil usaha, beban pokok disajikan setelah partisipasi bruto anggota dan harga pokok penjualan disajikan setelah penjualan.

2.2 Beban Operasional

Merupakan beban-beban yang dibayar atau yang diperhitungkan untuk menjalankan usaha dan organisasi koperasi selama satu periode pembukuan. Beban ini terbagi dalam beban penjualan, beban administrasi dan beban organisasi.

2.3 Beban Perkoperasian

Merupakan beban yang dikeluarkan sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

2.4 Beban Non Operasional

Merupakan beban-beban yang dikeluarkan atau perhitungan selama satu periode akuntansi, tetapi beban tersebut bukan merupakan beban untuk menjalankan kegiatan utama koperasi. Termasuk kategori ini adalah kerugian penjualan aktiva tetap, kerugian karena penurunan nilai persediaan.

2.5 Beban Luar Biasa

Merupakan beban-beban yang sifatnya luar biasa, yang dikeluarkan atau diperhitungkan bukan untuk tujuan menjalankan usaha koperasi sama sekali, tetapi timbul karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

c. Laporan Arus Kas

SAK ETAP paragraf 7.1 laporan arus menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas koperasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.2 setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang memiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

Paragraf 7.3 informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba dan rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :

- 1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
- 2) Penerimaan kas dan royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain.
- 3) Pembayaran kas kepada pemasok.
- 4) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.
- 5) Pembayaran kas atau retitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- 6) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2. Aktivitas Investasi

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- 1) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya.
- 2) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
- 3) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek uang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*.
- 4) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dalam *joint venture*.

3. Aktivitas Pendanaan

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktiitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna oleh para pemasok modal perusahaa. Contoh arus kas yang yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain.
- 2) Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas.
- 3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
- 4) Pelunasan pinjaman.
- 5) Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Menurut IAI dalam SAK laporan ini mencakup empat unsur yaitu:

- 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, merupakan selisih pengadaan barang atas harga pasar dengan pengadaan barang atas harga koperasi. Jika harga pengadaan barang yang ditawarkan koperasi lebih rendah dari pengadaan atas harga pasar, berarti terdapat manfaat ekonomi bagi anggota.
- 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, merupakan selisih pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi dengan pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar. Jika pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi lebih tinggi dari pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar, berarti terdapat manfaat ekonomi anggota.
- 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, terdiri dari dua jenis, yaitu: penghematan beban pinjaman anggota dan kelebihan balas jasa simpanan anggota. Penghematan beban pinjam anggota merupakan manfaat yang diperoleh anggota dengan meminjam pada koperasi karena adanya selisih bunga pinjaman antara koperasi dengan bank atau lembaga keuangan lain disekitar wilayah koperasi. Kelebihan balas jasa simpanan anggota merupakan manfaat yang diperoleh anggota dari menyimpan pada koperasi karena adanya selisih bunga simpanan antara koperasi dengan bank atau lembaga keuangan lain disekitar wilayah koperasi.

- 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima bagi anggota.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan pengungkapan yang memuat:

Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- 1) Pengakuan pendapatan dan beban berhubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- 2) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
- 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota

Pengungkapan informasi lain antara lain:

- 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.

- 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- 3) mengklasifikasikan piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota non anggota.
- 4) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 5) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.

Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat pendidikan manajemen koperasi, pelatihan pembinaan, kualitas konsultasi, dan lamanya pengurus bekerja terhadap kemampuan koperasi dalam menyusun laporan keuangan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana penelitian mengenai kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu, dan variabel penelitian yang digunakan. Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil penelitian
--------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

Tahun				
Rosnani 2004	Pengaruh Pembinaan Terhadap Kemampuan Manajemen Koperasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Kota Tembilahan	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Kota Tembilahan	Tingkat pendidikan dan pelatihan menunjukkan berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan koperasi dalam menyusun laporan keuangan

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil penelitian
Mesrawati Abiyus, 2009	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Koperasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Pendidikan Pengurus Di bidang Akuntansi, Pelatihan Pembinaan, dan Kualitas Konsultasi	Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat pendidikan pengurus di bidang akuntansi, pelatihan pembinaan dan kualitas menunjukkan pengaruh terhadap kemampuan koperasi dalam menyusun laporan keuangan
Yuhana Saddiah, 2008	Pengaruh Pembinaan Penerapan Akuntansi Koperasi Terhadap Kemampuan Manajemen Koperasi dalam Menyusun Laporan Keuangan di Kota Pekanbaru	Tingkat Pendidikan Pengurus, Pembinaan Akuntansi, dan Kualitas Konsultasi	Kota Pekanbaru	Tingkat pendidikan pengurus, pembinaan akuntansi dan kualitas konsultasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan manajemen dalam menyusun laporan keuangan.
Musiska Yessi, 2004	Pengaruh Persepsi Pengurus Koperasi Pada Laporan Keuangan Terhadap Kemampuan Koperasi Menyusun Laporan Keuangan Di Kota	Tingkat Pendidikan, Persepsi Pengurus	Kota Payakumbuh	Tingkat pendidikan dan persepsi pengurus berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan koperasi dalam menyusun laporan keuangan

	Payakumbuh			
--	------------	--	--	--

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan Manajemen Pengurus

Kartini Kartono (2006) memberikan pengertian, pendidikan adalah sebagai rangkaian kegiatan intensinal, bertujuan, disengaja, direncanakan, terorganisir secara sistematis, diawasi, dinilai serta diulang-ulang untuk menghasilkan prototipe manusia terdidik yang bermutu dan efisien. Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh Depertemen Pendidikan. Pendidikan manajer memiliki hubungan dengan tingkat penggunaan informasi akuntansi. semakin tinggi tingkat pendidikan manajer koperasi maka akan mudah menyerap pengetahuan dan mekenisme akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan. Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh Depertemen Pendidikan.

H1 = Tingkat pendidikan pengurus berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan.

b. Pelatihan Pembinaan

Menurut Hasan Alwi (2007) pembinaan dapat diartikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Secara teoritis semakin tinggi pembinaan akuntansi oleh pejabat koperasi maka laporan keuangan yang dibuat semakin baik.

Pembinaan atau dapat diartikan sebagai pelatihan dan pengembangan. Penggunaan istilah pelatihan (*training*) dan pengembangan (*development*) dikemukakan oleh para ahli, yaitu Dale Yoder menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai pelaksana dan pengawas. Sedangkan istilah pengembangan ditujukan untuk pegawai tingkat manajemen. (Anwar Prabu Mangkunegara, 2004;43).

H2 = Pelatihan Pembinaan pengurus berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan.

c. Kualitas Konsultasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2007) kualitas konsultasi adalah dianalisa dengan melihat ada tidaknya peningkatan keterampilan setelah asistensi diberikan. Semakin baik pemahaman manajemen koperasi atau semakin bertambah keterampilan penerapan akuntansinya akan semakin mudah bagi mereka untuk menyediakan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajer dan pengurus.

H3 = Tingkat kualitas konsultasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan.

d. Lamanya Bekerja Pengurus

Menurut Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2007) menyatakan bahwa, masa kerja (lama bekerja) merupakan pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), Pengalaman kerja didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor lamanya pengurus bekerja berpengaruh langsung yang positif dan bermakna terhadap kemampuan manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Serta semakin lama pengurus bekerja pada koperasi, maka semakin tinggi komitmennya terhadap koperasi. dalam masa kerjanya pengurus tersebut telah banyak mendapatkan pelatihan pembinaan akuntansi, sehingga dia lebih mudah dalam menyediakan laporan keuangan yang memudahkan manajer dalam mengambil keputusan.

H4 = Lamanya bekerja pengurus berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan

Untuk mendapatkan bukti bahwa kemampuan koperasi menyusun laporan keuangannya sendiri dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan, pelatihan pembinaan, kualitas konsultasi, dan lamanya bekerja pada koperasi primer di Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi.

H5 = Tingkat pendidikan pengurus, pelatihan pembinaan, kualitas konsultasi, dan lamanya bekerja pengurus berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan.

Gambar 2.1. Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Manajemen Koperasi dalam Menyusun Laporan Keuangan

